

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pangeran Moenta, 2018, *pokok- pokok hukum pemerintahan daerah*, PT. Grafindo Persada, Depok.
- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Fikri Hadin, 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press.
- Aminuddin Ilmar, 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana.
- Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum: Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cet. I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Awaluddin, 2017, *Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara*, LP4-OTDA: Pasangkayu.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan Dkk, 2019, *Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu*, Seleman Yogyakarta.Bulaksumur Empat.
- _____Dkk, 2019, *peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu*, Intigrafika sukses muliya, surabaya.
- Darwis, 2015, *Peran dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mamuju Utara*. CV. Inti Grafika Sukses Mulia: DPRD Kabupaten Mamuju Utara.

- Denhardt, Janet V, and Denhardt, Robert, 2003. *the new publik service : serving, not steering*, ME, Sharpe, New York.
- Djoko Prakoso, 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwiyanto, A. Dkk, 2002. *Revormasi birokrasi publik di indonesia*. Pustaka study kependudukan dan kebijakan. Universitas gajah mada. Yogyakarta.
- _____2015. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*
- Edy sutrisno, 2010, *budaya organisasi*, jakarta Pranamedia group
- Fachruddin, Riawan, 2009. *jenis jenis pengawasan*, WR Tjandra. Universitas adma jaya yogyakarta.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2018. *Sipritualisme Pancasila*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gaster, Lucy, 1995. *quality in the public service: managers'choeces*, open university press, buckingham, philadelphia, USA.
- Hamzah Ya'kub, 1993. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro.
- Hardiansyah, 2018, *kualitas pelayanan publik*, yogyakarta : grava media
- Irwansyah. 2020, *penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irawan Soejito, 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu _____2009, *pengantar ilmu hukum tata negara*, PT. Grafindo Persada, jakarta.

- Johnston van R, (ed), 2000. *Entrepreneurial management and public policy*, new york, nova science publisher, Inc.
- K. Bertenz, 2007. *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Marbun, B.N, 2006, *DPRD pertumbuhan dan cara kerjanya*, pustaka sinar harapan, jakarta.
- Modeong, 2000, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Tingkat Daerah*. Tintamas, Jakarta.
- Moekijat, 1994, *kordinasi:suatu tujuan teoritis*, mandar maju, Bandung.
- Muhamad Mufid, 2009,. *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Alfian, 2011. *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ni'matul Huda, 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Osborne, David dan Tad Gaebler, 1992. *how the entrepreneurial spirit is transforming the publik sector*, Reinventing Government new york :A Plume Book.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2017, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, Routledge, New York.
- Phillipus Mandiri Hadjon, dkk, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Putra, Fadhillah. 2012. *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Savas, E.S. 1987. *Privatization The Key to Better Government*, New Jersey: Chatam House Publisher.
- Siswanto Sunarno, 2006, hukum pemerintahan daerah indonesia, Sinar Grafika, jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1998, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya.
- _____2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I, Cet. XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sofyan S Harahap, 2010. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sthepan p robbins, 2015, *prilaku organisasi*, jakarta: salemba empat
- Sujanto, 1994. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sumarwanto, 2010, *Analisis pengembangan*, universitas indonesia
- Pabundu moh tika, 2014, *budaya organisasi dan kinerja perusahaan*, jakarta : bumi aksara
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama.
- Syamsir torang, 2014, *organisasi dan menejemen*, bandung: alfabeta

T. Hani Handoko, 1990. *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta, BPFE.

Wahyudi Kumorotomo, 2008. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wasistiono, Sadu. 2001. *kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.

Jurnal dan Lain- lain

A. B. Barrul Fuad. 2000. ***DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi***.
Jurnal Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1.

Brennan, carol dan alex douglas, 2002. ***Complaints procedures in local government***: infoming your costumers, the internasional journal of publick sector management, vol. 15 no 3, Mcd Up limited

Holillah, ***Etika Administrasi Publik***, Jurnal Review Politik Volume 2, no.2, Desember, 2013, hal. 234.

Mujar Ibnu Syarif, 2014. ***Contemporary Islamic Political Discourse On The Political Ethics Of State Officials, Shariah Journal***, Vol. 22, No. 2, Artikel diakses pada 2 juni 2021, dari <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6883>., h. 163.

Nining Haslinda Zainal, Analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada sekertariat pemerintah kota makassar, jurnal makassar fisipol, volume v, 2008, Hal 8

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), di akses pada tanggal 10 November 2021

Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan

Undang- Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang MD3

Lihat, Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Calon hakim agung yang akan dipilih oleh DPR adalah calon hakim agung yang
diusulkan dari komisi yudisial. Lihat pasal 24A UUD 1945, pasal 8 UU
No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14
tahun 1985 tentang mahkamah agung dan pasal 13 UUD No. 22 tahun
2004 tentang komisi yudisial.

LAMPIRAN



Audiensi dengan bapak bupati H. Yaumil Agus Ambo Djiwa, SH. Selaku kepala daerah kabupaten pasangayu.





Audiensi bersama bapak Zein, Nur Latif, dan Mahmud kabo, selaku anggota Sekertaris DPRD, Anggota DPRD Dapil I dan II : meliputi Kec. Pasangkayu, Kec. Pedongga, Kec. Tikke Raya, dan Kec. Bambalamutu, Kec. Bambaira dan Kec. Sarjo



Seminar yang dilakukan oleh Bapak Mulyadi, SH., kepala Bagian Hukum pemerintah Kab. Pasangkayu.



Audiensi dengan Bapak Anggota DPRD Kab. Pasangkayu terkait pengawasan yang di lakukan terhadap pemerintah Kab. Pasangkayu.



Penyerahan Data- data oleh Anggota DPRD Kab. Pasangkayu seperti, peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD Kab. Pasangkayu dll.



Audiensi Bersama bapak Drs. Musbar Lasibe, selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Pasangkayu



Audiensi terhadap staf-staf Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
Kab. Pasangkayu